

ABSTRAK

Pemerintah Kota Surakarta dituntut tidak hanya dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan Negara, tetapi juga harus mengoptimalkan pengelolaan aset daerah dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam mengelola Barang Milik Daerah dibutuhkan perencanaan kebutuhan dalam penganggaran, maka semua yang meliputi Pengelolaan Barang Milik Daerah penganggaran untuk perbaikan atau perencanaan, pemeliharaan serta pengadaan barang atau lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah penganggarnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Metode penelitian ini meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, tehnik pengumpulan data, dan metode analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengacu kepada hukum perundang-undangan yang berlaku dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas hukum.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah, dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah oleh pejabat Pemerintah Kota Surakarta telah dijalankan sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. Ditemukan adanya hambatan dalam melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah seperti belum adanya regulasi di daerah berupa Perda Pengelolaan Barang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia dan kurangnya komitmen pembinaan SKPD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Kendala dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di kantor Pemerintah Kota Surakarta adalah para pejabat pengadaan barang dan jasa yang menjadi informan cenderung belum dapat melakukan perannya dalam menentukan pengadaan barang yang berkualitas. Penegakan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 93 bahwa kerugian akibat kelalaian dan penyalahgunaan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dituntut ganti rugi dan dikenakan sanksi administratif.

Kata kunci : Pengelolaan barang milik Negara/Daerah, Kota Surakarta.

ABSTRACT

The Surakarta City Government is required not only to optimize the management of state finances, but also to optimize the management of regional assets and the management of Regional Property. Regional Property is all goods purchased or obtained at the expense of the Regional Budget or from other legal acquisitions. In managing Regional Property, planning needs in budgeting, so everything that includes Regional Property Management, budgeting for repair or planning, maintenance and procurement of goods or others in accordance with the provisions of Article 3 paragraph (2) Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of Property State / Region budgeting from the Regional Revenue and Expenditure Budget.

This research method includes approach methods, research specifications, types and sources of data, data collection techniques, and data analysis methods. In this study using a normative juridical approach, juridical approach, which is an approach that refers to the applicable laws and regulations and examines library materials or secondary data on the principle of law.

The research results obtained are, in the management of State / Regional Property by Surakarta City Government officials have been carried out according to Regional Regulation No. 7 of 2016. It is found that there are obstacles in carrying out management of Regional Property such as the absence of regulations in the area in the form of Regional Regulation on Management of Goods based on Government Regulations Number 7 of 2016, limited knowledge and understanding of human resources and lack of commitment to co-operate SKPD in the management of Regional Property. Constraints in the management of State / Regional Property in the Surakarta City Government office are the officials of the procurement of goods and services who become informants tend not to be able to perform their role in determining the procurement of quality goods. Law enforcement based on Surakarta City Regulation No. 8/2008 Article 93 states that losses due to negligence and misuse of management of State / Regional Property are required for compensation and are subject to administrative sanctions.

Keywords: Management of State / Regional Property of the City, Surakarta City Government Officials.